

## Pengaruh Demografi Dan Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Depopulasi Negara Jepang Selama 2 Dekade Terakhir

Muhammad Praja Wibawa<sup>1</sup>, Rani Arfianty<sup>2</sup>

TransBorders\*

### Abstract

*Depopulation is an event of a continuous decline in population over time in an area. This research starts from the discovery of problems in the phenomenon of depopulation in Japan, among the causes are demographic factors and Japanese government policies. Because of this, research was conducted with the aim of finding the causes of depopulation of Japan from the analysis of demographics and Japanese government policies in the past 2 decades. The method used is data collection by finding data sources and comparing data from various sources such as news media, statistics, and existing research. The results show how demographic changes occur and government policies towards these changes. To determine its impact on the current depopulation phenomenon in Japan. Through research on demographic change and Japanese government policy, it can be concluded that demographic change does not always have a negative impact but can also have a positive impact both in terms of population parameters and other aspects.*

**Keywords:** *Japan; Demography; Depopulation; Urbanization*

### Abstrak

Depopulasi adalah peristiwa terjadinya penurunan jumlah penduduk secara terus menerus seiring waktu di suatu wilayah. Penelitian ini berawal dari ditemukannya masalah pada fenomena depopulasi Negara Jepang, diantara penyebabnya ada faktor demografi dan kebijakan pemerintah Jepang. Karena hal ini, penelitian diadakan dengan tujuan menemukan penyebab depopulasi Negara Jepang dari analisis demografi dan kebijakan pemerintah Jepang dalam rentang 2 dekade terakhir. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara mencari sumber data dan mengkomparasi antar data dari berbagai sumber seperti media berita, statistik, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya memperlihatkan bagaimana terjadinya perubahan demografi dan kebijakan pemerintah terhadap perubahan tersebut. Untuk mengetahui dampaknya terhadap fenomena depopulasi di Jepang saat ini. Melalui penelitian terhadap perubahan demografi dan kebijakan pemerintah Jepang dapat disimpulkan bahwa perubahan demografi tidak selalu membawa dampak negatif tetapi juga dapat membawa dampak positif baik dalam aspek parameter populasi maupun aspek lainnya.

**Kata Kunci:** *Jepang; Demografi; Depopulasi; Urbanisasi*

---

<sup>1</sup> Program Studi Sastra Jepang, Universitas Sumatera Utara  
Email: [muhammadpraja01@gmail.com](mailto:muhammadpraja01@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Sastra Jepang, Universitas Sumatera Utara  
Email: [rani.arfianty@usu.ac.id](mailto:rani.arfianty@usu.ac.id)

\* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS  
Email: [trans'borders@unpas.ac.id](mailto:trans'borders@unpas.ac.id)

## Pendahuluan

Penurunan populasi adalah tsunami besar yang menelan segalanya (Menju, 2017). Selama 1 dekade terakhir, istilah "人口減少/*Jinkou Genshou* (Penurunan Populasi)" telah menjadi ungkapan yang sangat populer di Jepang. Jumlah penduduk Jepang mulai menurun setelah mencapai puncaknya (128,08 juta orang) pada tahun 2008. Karena proyeksi populasi jangka panjang oleh Institut Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional tahun 2017 menunjukkan bahwa penurunan tahunan negara ini akan berangsur-angsur membesar, keseriusan masalah ini telah diakui secara luas, sehingga menghasilkan banyak sekali diskusi tentang penurunan populasi (Takahashi Inoue & Shiro Koike, 2021). Penurunan jumlah penduduk memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk masyarakat, ekonomi, dan budaya (Bricker & Ibbitson, 2019).

Faktor utama penyebab depopulasi di Jepang saat ini adalah adanya perubahan yang signifikan pada aspek demografi. Penduduk Jepang semakin menua dan generasi mudanya kian menyusut. Generasi muda yang mulanya tinggal di desa, sudah banyak yang berpindah ke kota demi mengejar karir. Akibat dari budaya keras dalam bekerja dan sifat individualisme yang dimiliki orang Jepang, mereka cenderung nyaman dengan kesibukannya dan tidak ingin mempertimbangkan untuk berkeluarga serta memiliki anak. Di samping itu, sulitnya persyaratan pernikahan yang berlaku di Jepang juga menjadi penghambat bagi penduduknya untuk menikah (M David & Najla H.H, 2023).

Di Jepang, pria masih dianggap sebagai penyokong utama keluarga sehingga apabila ingin menikah, laki-laki merasa harus memiliki pekerjaan serta sumber nafkah yang stabil terlebih dahulu. Kurangnya peluang karir yang

menjanjikan membuat para pria tidak ingin menikah dan memiliki anak. Banyak penduduk asli Jepang yang hanya bekerja part time dengan upah yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan wanita, mereka cenderung diberikan beban peran untuk mengurus anak dalam pernikahan. Wanita karir yang telah melahirkan anak pertamanya akan perlahan tersingkirkan dan mulai tergantikan oleh para fresh graduate. Namun, di sisi lain pihak perempuan juga cenderung mempertimbangkan kekurangan pihak pria dan memilih untuk tidak menikah sebelum menemukan pria yang sesuai standarnya. Dengan kata lain, generasi muda di Jepang memang memiliki standar yang tinggi dalam memilih pasangan.

Faktor lain yang mendorong depopulasi di Jepang adalah Pandemi Covid-19 kemarin. Seperti di Indonesia, Pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus meminimalisir interaksi secara langsung. Mayoritas perusahaan juga menerapkan sistem work from home guna menjaga karyawannya dari paparan virus. Terlebih pada industri jasa, tekanan dari arahan pemerintah Jepang sangat mempengaruhi mereka untuk bekerja dari rumah yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya pelanggan. Selain itu, arahan pemerintah untuk bekerja dari rumah pada akhirnya juga berdampak pada berkurangnya hubungan emosional serta komunikasi pasangan-pasangan di Jepang sehingga mereka cenderung gagal mempertahankan hubungannya.

Ada beberapa artikel penelitian yang kajiannya memiliki persamaan dengan penelitian ini, diantaranya adalah yang dilakukan oleh dan Joel Stewart (2007). Ryo Oizumi & Hisashi Inaba lebih teknis dan fokus pada analisis matematis terkait dengan dinamika demografi, sementara Joel Stewart lebih bersifat umum, membahas krisis

demografi secara lebih luas, dan menekankan perubahan dalam pemikiran yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam disiplin ilmu geografi, bahkan di Jepang, hanya sedikit studi komprehensif sebelumnya yang berfokus pada bagaimana penurunan populasi mempengaruhi geografi populasi suatu negara secara keseluruhan, dan banyak pencapaian terkait depopulasi sebelumnya yang dipublikasikan dalam bahasa Jepang. Oleh karena itu, penulis meninjau literatur yang ada terkait dengan dampak depopulasi terhadap geografi populasi negara merupakan upaya yang ambisius. Pelajaran yang didapat dari penelitian ini akan sangat berharga dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap geografi populasi. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk meninjau jurnal yang ada secara komprehensif melalui perspektif dampak depopulasi terhadap geografi populasi di Jepang, sebuah negara yang disebut sebagai indikator utama demografi, dan untuk menyajikan isu-isu penelitian baru berdasarkan temuan yang diperoleh.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memilih merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Jepang selama 2 dekade terakhir dalam upaya mengatasi depopulasi. Ini melibatkan analisis demografi dan kebijakan yang telah diimplementasikan dan dampaknya.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian (Lexy J. Moleong 2011). Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan

merekonstruksi dari berbagai sumber seperti media berita, penelitian, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara komprehensif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dipikirkan oleh beberapa individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2013).

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau

fenomena. Penelitian ini dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Desain penelitian deskriptif dapat menggunakan berbagai macam metode penelitian untuk menyelidiki satu atau beberapa variabel. Tidak seperti dalam penelitian eksperimental, peneliti tidak mengontrol atau memanipulasi variabel apa pun, tetapi hanya mengamati dan mengukurnya McCombes, S. (2019). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana terjadinya fenomena depopulasi jepang selama periode 2 dekade terakhir.

### Hasil dan Pembahasan

*Shoushi Koureika* (少子高齢化) adalah Penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua, populasi yang menua dikombinasikan dengan jumlah anak yang berkurang, penurunan angka

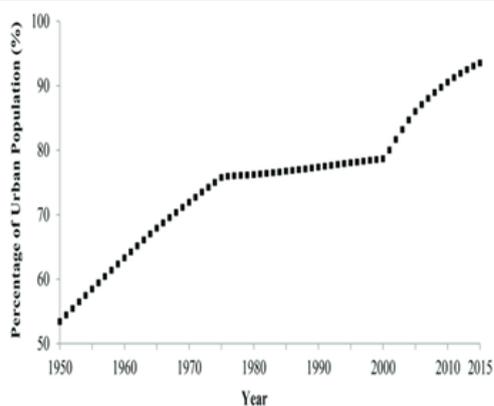
kelahiran dan peningkatan proporsi orang tua, penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua, angka kelahiran rendah dan umur panjang. Berikut adalah uraian faktor penyebab depopulasi dan pendukung bertambahnya populasi yang kemudian di tinjau dari data statistik, sejarah, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang.

### Urbanisasi Besar-besaran

Urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, peningkatan bertahap dalam proporsi orang yang tinggal di daerah perkotaan, dan cara-cara yang digunakan oleh setiap masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Proses di mana suatu masyarakat berubah dari gaya hidup pedesaan menjadi gaya hidup perkotaan (David V, 2002). Lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di daerah perkotaan – dan semakin banyak penduduk di kota-kota yang sangat padat penduduknya. Namun kondisi

perkotaan merupakan fenomena yang relatif baru dalam sejarah manusia. Transisi ini telah mengubah cara kita hidup, bekerja, bepergian, dan membangun jaringan (Hannah Ritchie & Max Roser, 2018). Berikut adalah statistik Urbanisasi Jepang yang tahun 1950 hingga 2015.

#### Data (1) & (2)



Persentase Urbanisasi Jepang (1950 – 2015)

Sumber : *Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan.*

“Dalam dua dekade terakhir, tingkat urbanisasi di Jepang telah meningkat pesat dan puncaknya di angka 91,7 persen. Ini berarti kurang dari 10 persen dari populasi Jepang yang berjumlah 126 juta jiwa tidak tinggal di lingkungan perkotaan. Tingkat urbanisasi di Jepang jauh di atas tingkat urbanisasi di seluruh dunia, yaitu 55 persen, Aaron O'Neill (2023).” dikutip dari statista.com

Berdasarkan data 1 dan 2, persentase urbanisasi di Jepang sangatlah tinggi terutama selama 2 dekade terakhir. Dahulu pada abad ke 20 Urbanisasi di Jepang terjadi karena kembalinya tentara dan warga sipil dari wilayah jajahan, ledakan kelahiran bayi (baby boom), dan migrasi internal. Namun memasuki abad ke 21, faktor tersebut tidaklah lagi relevan karena seiring berkembangnya zaman, penyebabnya dari berbagai faktor diantaranya adalah meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup yang tinggi. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Urban sehingga menciptakan masalah lain seperti kesenjangan sosial dan ekonomi dan tingkat stress yang tinggi. Hal ini juga lah yang membuat angka kelahiran Jepang semakin rendah terutama di daerah terpencil yang terdampak Urbanisasi karena kalangan muda beramai-ramai melakukan urbanisasi sehingga hanya menyisakan sebagian kecil penduduk yang sudah berumur.

Oleh karena itu, pemerintah Jepang telah merancang kebijakan yaitu Kebijakan Nasional Pada tahun 1960-an, Jepang memulai upayanya untuk mengelola urbanisasi di tingkat nasional dan lokal. Rencana Pembangunan Nasional Komprehensif Jepang (CNDP) diperkenalkan sebagai sarana utama

untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan daerah yang seimbang. Sejak tahun 1962, ada empat CNDP yang telah disusun. CNDP tersebut adalah CNDP tahun 1962, 1969, 1972, 1987, dan 1998, yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pertama hingga Kelima. Karena alasan politik, Rencana Pembangunan Nasional Komprehensif Ketiga di tahun 1972 tidak pernah dilaksanakan sedangkan Rencana Kelima dilaksanakan baru di abad sekarang. Tujuan utama dari CNDP Pertama adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam pembangunan ekonomi melalui strategi kutub pertumbuhan. Hal ini juga diharapkan dapat menekan terjadinya CNDP Pertama membagi wilayah negara menjadi tiga jenis: area konsentrasi yang berlebihan, area penyesuaian, dan area pengembangan.

Area konsentrasi yang berlebihan, termasuk Tokyo, Osaka, dan Nagoya, ditetapkan untuk membatasi pertumbuhan industri dan mendorong relokasi pabrik. Area penyesuaian mengacu pada wilayah sekitar kota-kota besar, di mana perusahaan industri didorong untuk pindah dan pusat-pusat pinggiran kota seharusnya berkembang. Wilayah pengembangan adalah tempat di mana pertumbuhan dipromosikan. Di bawah CNDP Pertama, dua program dekonstruksi konkret, yaitu program Kota Industri Baru (*NIC*) dan program Kawasan Khusus (*SA*), diinisiasi dan diimplementasikan secara nasional pada tahun 1960-an dan 1970-an. Lima belas *NIC* dan enam *SA* ditetapkan di bawah payung strategi kutub pertumbuhan, dengan target untuk mengurangi konsentrasi yang berlebihan di kawasan-kawasan industri utama dan mendistribusikan pembangunan di daerah-daerah yang lebih luas untuk pembangunan yang lebih seimbang (NJ Glickman, 1979). Dengan kebijakan ini, ditargetkan dapat mengurangi angka urbanisasi di Jepang dan meningkatkan

kesejahteraan ekonomi secara merata sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran di kawasan yang tidak terjamah urbanisasi.

## Fenomena Imigrasi dan Emigrasi

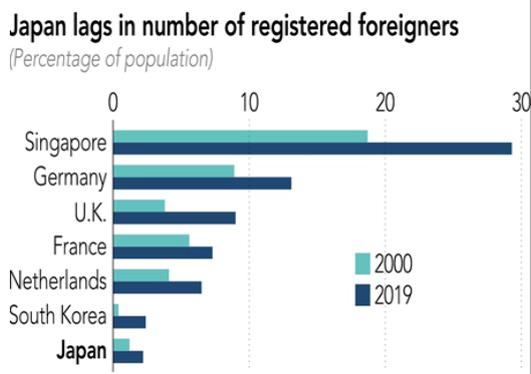
### Imigrasi

Imigrasi, proses di mana seseorang menjadi penduduk tetap atau warga negara dari negara lain. Secara historis, proses imigrasi telah memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya yang besar bagi negara. Pengalaman imigrasi sangat panjang dan beragam dan dalam banyak kasus telah menghasilkan perkembangan masyarakat *multicultural*, banyak negara modern dicirikan oleh berbagai macam budaya dan etnis yang berasal dari periode imigrasi

sebelumnya (Sarah P, 2023).

Saat ini, Jepang secara keseluruhan adalah negara yang mengalami penurunan populasi, dan penurunan populasi telah terlihat di banyak wilayah sub-nasional seperti prefektur dan kotamadya. Menurut Sensus Penduduk Jepang 2015, populasi di 39 (83%) dari 47 prefektur di Jepang menyusut antara tahun 2010 dan 2015, demikian juga dengan 1419 (82,5%) dari 1.719 kotamadya. Di sebagian besar wilayah tersebut, bahkan di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, penurunan alami terjadi. meskipun 89,4% prefektur telah mencatat penurunan alami antara tahun 2010 dan 2015, 91,4% kotamadya mengalaminya antara tahun 2018 dan 2019. Depopulasi akibat penurunan alami di Jepang di tingkat nasional dan prefektur/kotamadya merupakan konsekuensi demografis yang tak terelakkan dari rendahnya tingkat kesuburan dan tingkat imigrasi yang rendah, ditambah dengan tingginya angka kematian akibat populasi yang menua (Esaki, 2016; Yamauchi. 2017).

### Data (3) & (4)



#### Jumlah Imigran di Jepang (2000 – 2019)

Sumber ; asia.nikkei.com

“Menurut Kementerian Kehakiman Jepang, jumlah penduduk asing di Jepang terus meningkat pada periode pasca Perang Dunia 2, dan jumlah penduduk asing imigran lebih dari 2,88 juta pada akhir tahun 2020. Dengan perkiraan populasi sebesar 125,57 juta pada tahun 2020 populasi penduduk asing di Jepang berjumlah sekitar 2,29% dari total populasi”. dikutip dari wikipedia.org.

Berdasarkan Data 3 & 4 diatas data statistik imigran 2019 dan data imigran 2020 dari Wikipedia tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan yang berarti imigrasi di Jepang sangat sedikit tahun ke tahun juga jika dibanding negara maju serupa lainnya Jepang termasuk yang terendah. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan populasi di Jepang itu sendiri. Oleh karena itu, imigrasi massal merupakan solusi instan terhadap menyusutnya angkatan kerja di Jepang, populasi yang menua, dan menurunnya konsumsi dalam negeri.

Jepang harus meniru keberhasilan negara-negara yang bergantung pada imigrasi, seperti Kanada, dengan menargetkan masuknya satu juta imigran setiap tahunnya untuk mengatasi penurunan populasi. Badan Layanan Imigrasi Jepang juga harus mengikuti jejak Badan Pariwisata Jepang, yang telah menetapkan target dasar untuk menarik 60 juta pengunjung asing per tahun, dengan menetapkan

target imigrasi. Sebuah sistem yang memberikan izin tinggal jangka panjang kepada orang asing kaya yang membeli rumah akan membantu mengurangi surplus perumahan di Jepang.

Memasuki abad ke 21 pergeseran demografi yang diperkirakan akan terjadi, memberikan tekanan yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat pada umumnya. Meningkatnya krisis terkait masalah demografi negara terlihat dalam kebijakan social PM Jepang yaitu Kishida baru-baru ini, termasuk kebijakan untuk pekerja terampil, pengungsi, dan pelajar internasional. Inisiatif-inisiatif ini dapat menunjukkan bahwa negara tersebut bersiap untuk menerima lebih banyak imigran.

Masyarakat Kebijakan Jepang yang lambat berubah terhadap penduduk asing sejalan dengan peningkatan bertahap jumlah migran untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja. Sejak akhir tahun 1970an hingga awal tahun 1980an, Jepang menyetujui beberapa perjanjian internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1979), Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1979), dan Konvensi terkait status pengungsi (1981), yang bersama-sama menyebabkan perluasan sistem kesejahteraan sosial Jepang kepada penduduk asing. Pada tahun 1984, Jepang merevisi undang-undang kewarganegaraan dan pendaftaran keluarga, yang memperbolehkan kewarganegaraan juga diturunkan melalui ibu, penggunaan nama keluarga asing, dan hak untuk memilih kewarganegaraan pada usia 21 tahun bagi mereka yang lahir dengan lebih dari satu kewarganegaraan. Dan pada tahun 1990, Jepang mengesahkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengungsi, yang memperkenalkan beberapa 'pintu samping' bagi tenaga kerja asing tidak terampil melalui program khusus seperti

visa jangka panjang untuk keturunan Jepang di luar negeri dan program magang teknis jangka pendek. Contoh-contoh kebijakan liberalisasi Jepang ini, meskipun terbatas, menunjukkan kesediaan Jepang untuk beradaptasi guna mengakomodasi perubahan demografi negara tersebut. (S Harrison, 2023).

Jepang Baru-baru ini juga, beberapa perkembangan telah terjadi dalam kebijakan migrasi Jepang yang sedikit demi sedikit berubah. Pada bulan Februari 2023, kabinet Jepang menyetujui proposal dari Kementerian Kehakiman untuk sistem visa baru guna menarik orang-orang berpenghasilan tinggi dan lulusan terbaik. Pada bulan Aprilnya juga, pemerintah mulai membahas rancangan proposal inisiatif untuk mempromosikan pertukaran pelajar di luar negeri bagi pelajar Jepang dan asing. Perkembangan pada bulan April tersebut diikuti oleh persetujuan partai besar di Jepang yaitu Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa untuk memperluas cakupan pekerja berketerampilan khusus dan mengizinkan pekerja asing berketerampilan rendah untuk memperbarui status tinggal mereka di Jepang tanpa batas waktu. Dan pada bulan Juni kemarin, Badan Pelayanan Imigrasi Jepang memperpanjang program kerja bagi keturunan Jepang yang dulunya maksimal dari keturunan ke-3 menjadi keturunan ke-4. Kemudian di akhir bulan Juni, pemerintah menyetujui revisi undang-undang imigrasi. Hal ini mencakup isu-isu kontroversial seperti deportasi paksa terhadap pengungsi. Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan adanya pola perubahan dalam pendekatan imigrasi di Jepang demi menanggulangi masalah depopulasi dimasa yang akan datang.

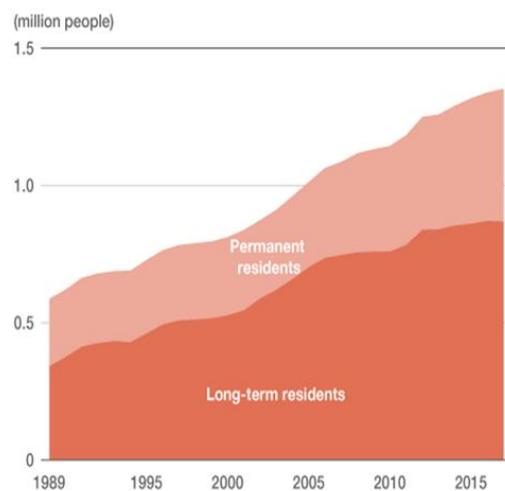
**Emigrasi**

Emigrasi adalah relokasi atau proses perpindahan orang dari satu negara ke negara lain. Orang-orang

beremigrasi karena berbagai alasan, termasuk meningkatkan kesempatan kerja atau meningkatkan kualitas hidup. Emigrasi memengaruhi perekonomian negara-negara yang terlibat, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada kondisi perekonomian negara tersebut. (Will K, 2023). Berdasarkan kedua penjelasan diatas, imigrasi berfokus pada penduduk yang masuk ke suatu tempat, sementara emigrasi berfokus pada penduduk yang meninggalkan suatu tempat. Kedua konsep ini sering digunakan bersama-sama dalam konteks pergerakan penduduk global. Berikut adalah data statistik emigran Jepang yang tersebar di berbagai Negara saat ini.

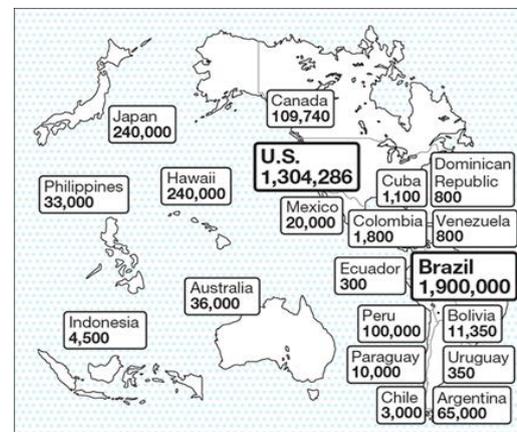
**Data (5), (6) & (7)**

**Japanese Residents Overseas**



**Residen Jepang di Seluruh Dunia (1989 - 2015)**

Sumber : Nippon.com



**Persebaran Keturunan & Emigran Jepang**

Sumber : Japan.go.jp

“Jumlah orang Jepang yang tinggal di luar negeri per 1 Oktober 2014 tercatat sebanyak 1,3 juta orang, menurut Laporan Tahunan Statistik Warga Negara Jepang di Luar Negeri dari Kementerian Luar Negeri. Jumlah tersebut naik 0,7 % dari tahun sebelumnya. Dari warga Jepang yang telah berada di luar negeri selama tiga bulan atau lebih, 474.996 (38 %) berada di Amerika Utara, 362.878 (29 %) di Asia dan 194.406 (15 %) di Eropa Barat, kata laporan itu. Berdasarkan negara, 412.639 tinggal di Amerika Serikat, 135.078 di Cina, 81.981 di Australia, 67.148 di Inggris dan 62.349 di Kanada, katanya. Jumlah orang Jepang di Cina, bagaimanapun, merosot 10,2% dari tahun sebelumnya, laporan itu menunjukkan. Sementara itu, Kamboja mengalami lonjakan 21,2% dalam jumlah penduduk Jepang menjadi 1.793 orang, sementara populasi orang Jepang di Myanmar melonjak 42,6% menjadi 891 orang. Di dekatnya, Singapura mengalami kenaikan 12,8% menjadi 31.038 dan Indonesia mengalami kenaikan 10,7% menjadi 16.296, dengan populasi orang Jepang naik 10,5% menjadi 7.883 di India.” dikutip dari japantimes.co.jp

Berdasarkan data 5, 6 dan 7 diatas jumlah emigran Jepang mencapai kurang lebih 1% dari jumlah populasi di Jepang itu sendiri saat ini. Jika di total dengan keturunan Jepang yang berada di Brazil sejumlah 1,9 juta populasi maka total nya mencapai 3.8 juta emigran Jepang dan orang-orang keturunan Jepang yang tinggal di berbagai negara di seluruh dunia. Tahun ini menandai 115 tahun sejak migrasi pertama orang Jepang ke Brasil. Bagaimanapun, Gempa Bumi Besar Kanto yang terjadi seabad yang lalu dan kekacauan yang ditimbulkannya menjadi pemicu utama tumbuhnya emigrasi Jepang di negara Amerika Selatan tersebut. (Chitose N, 2023).

Tokyo dan sekitarnya mengalami kerusakan parah akibat gempa tersebut, yang mendorong banyak orang untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan Jepang karena mereka telah kehilangan harta benda. Pemerintah pun ikut serta dengan mendorong

emigrasi massal melalui subsidi perjalanan bagi para korban. Sebagai hasilnya, Brasil kini memiliki komunitas "Nikkei" terbesar di dunia, nama yang diberikan kepada orang-orang keturunan Jepang yang tinggal di luar tanah air leluhur mereka.

*Nikkei* berasal dari istilah *Nikkeijin* (日系人) dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menyebut bangsa Jepang yang beremigrasi dari Jepang serta keturunan mereka. Emigrasi mengacu pada pemukim yang permanen, jadi tidak termasuk orang Jepang yang sementara berada di luar negeri. Kelompok-kelompok ini secara historis dibedakan dengan istilah *Issei* (nikkeijin generasi pertama), *nisei* (nikkeijin generasi kedua), *sansei* (nikkeijin generasi ketiga), dan *yonsei* (nikkeijin generasi keempat). Istilah *Nikkeijin* dapat dianggap berlaku atau tidak berlaku bagi orang-orang Jepang yang masih memegang kewarganegaraan Jepang. Definisi inklusif melihat emigran Jepang yang telah secara signifikan terakulturasi dengan lingkungan baru mereka sebagai "*Nikkeijin*" sementara definisi eksklusif hanya mencakup anak-anak mereka, yang lahir dan dibesarkan di luar Jepang (yang mungkin memiliki atau tidak memiliki kewarganegaraan ganda).

Dulunya pada 1640-an, Keshogunan Tokugawa membuat peraturan pembatasan maritim yang melarang warga Jepang meninggalkan negerinya, dan melarang kembali bila mereka sudah berada di luar negeri. Kebijakan ini kemudian tidak dicabut selama lebih dari 200 tahun. Pembatasan perjalanan mulai berkurang setelah Jepang membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat. Pada tahun 1867, pemerintahan bakufu mulai mengeluarkan dokumen perjalanan untuk perjalanan ke luar negeri dan emigrasi. Di abad selanjutnya Badan pelaksana Kementerian Luar Negeri

Jepang, meliputi penyuluhan dan pelayanan lain bagi mereka yang ingin bermigrasi, bantuan pengelolaan pertanian, perawatan kesehatan, pendidikan bagi pemuda, perbaikan jalan dan lingkungan hidup lainnya, pembiayaan dana usaha dan bentuk bantuan lain bagi para emigran yang sudah menetap di luar negeri, serta pengiriman ke luar negeri bagi para pemuda yang berminat untuk bermukim di luar negeri dan kerja sama dengan masyarakat lokal di sana. Hingga saat ini pemerintah Jepang tidak banyak merubah terkait kebijakan emigrasi yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Dan meskipun pada saat ini jumlah emigran saat ini tidak terlalu banyak, semakin banyak orang Jepang yang tinggal di luar negeri untuk bekerja, belajar, atau alasan lain, banyak dari mereka yang akhirnya menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar negeri. Kebijakan emigrasi Jepang harus cukup fleksibel untuk membantu para emigran generasi baru ini dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Juga harus ada pertimbangan serius mengenai apa yang dapat dan harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi situasi depopulasi yang diciptakan oleh fakta bahwa, sebagian besar sebagai akibat dari emigrasi sebelumnya, ada 1,3 juta orang Jepang yang tinggal di luar negeri, yang juga bisa menjadi salah satu faktor pencegah depopulasi di Jepang saat ini.

### Kesimpulan

Analisis ini memperlihatkan bagaimana dulunya Jepang mengalami lonjakan populasi pasca perang tetapi sekarang mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dapat dilihat dari statistik populasi Jepang tahun ke tahun kian menurun. Adanya beberapa pengaruh yang menyebabkan terjadinya penurunan populasi Jepang dan pendukung kenaikan populasi di

sebabkan oleh perubahan demografis yang signifikan serta didukung oleh kebijakan pemerintah Jepang itu sendiri baik pro maupun kontra terhadap situasi terjadinya perubahan demografi di Jepang. Sehingga dapat memahami bahwa perubahan demografi dan kebijakan tidak selalu membawa dampak negatif tetapi juga dapat membawa dampak positif baik dalam aspek parameter populasi maupun aspek lainnya.

### Daftar Pustaka

- Aaron O’neill, (2023) “*Urbanization in Japan 2021*”. Statista.  
<https://www.statista.com/statistics/270086/urbanization-in-japan/>
- Bricker & Ibbitson, (2019). “*Empty Planet: the Shock of Global Population Decline*”. White Horse Press.  
<http://dx.doi.org/10.3197/jps.2019.3.2.87>
- Chitose Nakagawa (2023) “*Japanese diaspora in Brazil remembers disaster that proved its genesis*”. Kyodo News.  
<https://english.kyodonews.net/news/2023/08/83de62262027-feature-japans-brazilian-diaspora-remembers-disaster-that-proved-its-genesis.html>
- Creswell (2013) “*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*”. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar.
- David V & Sandro G (2002) “*Urbanization, urbanicity, and health*”. National Library of Medicine.  
[https://doi.org/10.1093%2Fjurban%2F79.suppl\\_1.S1](https://doi.org/10.1093%2Fjurban%2F79.suppl_1.S1)
- Esaki Y, Kajita S, Yamauchi M, Shiro K, (2016) “*Current states of non-*

- metropolitan cities in Japan*". Tokyo Geographical Society. <http://dx.doi.org/10.5026/jgeography.125.431>
- Hannah R & Max R, (2018). "Unplanned Urban Development: A Neglected Global Threat". Our World in Data. <https://ourworldindata.org/plastic-pollution>
- Joel Stewart, (2000) "An Investigation into Japan's Population: The Current State of Decline". Portland State University Library. <http://dx.doi.org/10.15760/geogmaster.16>
- M David & Najla H.H, (2023) "Implikasi Depopulasi Jepang Terhadap Keberlangsungan Politik dan Ekonomi di Masa Depan". Jakarta: FPCI Chapter UPN Veteran.
- McCombes (2019) "Descriptive research design: Definition, methods and examples". <https://www.scribbr.com/methodology/descriptive-research/>
- Menju, T (2017). "Marginal nation: Japan's final choice which is forced to make due to depopulation.". Asahi Shinbun Shuppan.
- Minae K & Yuki H (2017) "Genome-wide association studies identify PRKCB as a novel genetic susceptibility locus for primary biliary cholangitis in the Japanese population". Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hmg/ddw406>
- Moleong, L. (2011). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- NJ Glickman & Michelle J, (1979) "Urban Land-Use Patterns: An International Comparison". Sage Journals. <https://doi.org/10.1068/a110035>
- Sarah Parry, (2023) "Immigration". Britannica. <https://www.britannica.com/topic/immigration>
- Scott H & Momo S (2023) "Japan Needs More Labour, Is Immigration the Answer?" Asia Pacific. <https://www.asiapacific.ca/publication/japan-needs-more-labour-immigration-answer>
- Takahashi I, Shiro K, Yamauchi M, Yoshitaka I, (2021). "Exploring the impact of depopulation on a country's population geography: Lessons learned from Japan". Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/psp.2543>
- Will Kenton (2023) "What Is Emigration? Definition, Reasons, and Economic Impact". Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/e/emigration.asp>